

# Minyak Kelapa Sawit

Perkembangan dan Resiko dari Ledakan Pasar Minyak kelapa sawit



Foto: Klaus Schenck / Rettet den Regenwald

## ■ Minyak Kelapa Sawit Menguasai Pasar Dunia

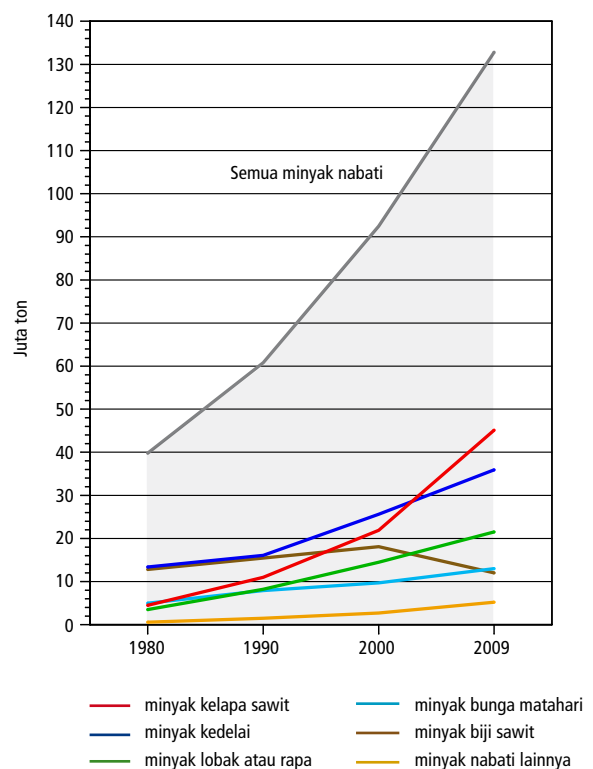
Sejak beberapa tahun ini sejumlah organisasi mitra "Brot für die Welt" dan "Vereinte Evangelische Mission" di Indonesia menunjukkan perhatian khusus terhadap masalah yang saat ini sangat mendesak yakni: semakin meluasnya perkebunan-perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hal ini berarti terjadinya penggundulan hutan hujan tropis seluas jutaan hektar serta penggusuran penduduk setempat. Pada tahun-tahun belakangan ini, Indonesia menjadi penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia dan bersama dengan Malaysia memasok 90% dari jumlah total yang diperdagangkan di pasar internasional. Demikian juga negara Jerman terus mencatat kenaikan impor minyak kelapa sawit yang hingga kini hampir mencapai satu juta ton per tahun (2008). Oleh karena itu, untuk menghindari dampak-dampak negatif dari produksi minyak kelapa sawit, diperlukan adanya kriteria-kriteria yang menjamin produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Kriteria-kriteria tersebut harus berlaku secara global, memperhatikan aspek sosial dan ramah lingkungan, sehingga dapat menjadi acuan dalam penggunaan minyak kelapa sawit sebagai bahan makanan, sebagai bahan bakar atau dalam industri-industri kimia.

Penggunaan terbanyak minyak kelapa sawit terdapat dalam industri pangan. Sebagian besar bahan-bahan makanan di pasar swalayan – mulai dari margarin sampai pizza siap saji – mengandung minyak kelapa sawit, yang dalam daftar kandungan biasanya disamarkan dengan nama minyak nabati. Bahkan saat membeli lipstik, sabun cuci atau lak, banyak konsumen yang tidak sadar, bahwa semua itu mengandung minyak kelapa sawit. Di samping itu, minyak kelapa sawit juga dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk pembangkit tenaga listrik atau diolah menjadi biodiesel untuk kendaraan.

### Diminati Seluruh Dunia

Dalam tigapuluh tahun terakhir, jumlah konsumsi minyak nabati di seluruh dunia meningkat tiga kali lipat. Diantara komoditas utama minyak nabati, minyak kelapa sawit jauh meraih tingkat pertumbuhan paling tinggi: produksinya mencapai hingga sepuluh kali lipat, sehingga besarnya jumlah konsumsi minyak kelapa sawit diantara minyak nabati lainnya telah mencapai 34 persen yang tadinya hanya 11 persen. Bahkan kalau produksi minyak biji sawit ikut dihitung, maka besarnya mencapai 38 persen (Teoh 2010:7). Minyak kelapa sawit dapat diperoleh dari daging buah kelapa sawit itu sendiri atau dari perasan biji sawitnya yang disebut dengan minyak biji sawit.

### Produksi minyak nabati, 1980 – 2009 (dalam juta ton)



Sumber: Teoh 2010: 7



Foto: Greenpeace / Oka Budhi

**Perlu Perawatan Khusus**

Aslinya tumbuhan kelapa sawit berasal dari Afrika. Namun sekarang kelapa sawit juga sudah banyak ditanam di Amerika dan terutama di Asia Tenggara. Tumbuhan kelapa sawit membutuhkan iklim lembab tropis dan dapat menghasilkan hingga ribuan buah hanya pada satu pohon, sehingga beratnya dapat mencapai 50 kg. Karena lemak yang terdapat dalam buah kelapa sawit cepat sekali rusak akibat suatu enzim, maka setelah panen, buah kelapa sawit tersebut harus diolah dalam waktu 24 jam. Biasanya pohon kelapa sawit pertama kali berbuah sesudah berumur 3–4 tahun dan pada umur 10–18 tahun kelapa sawit menghasilkan panen yang maksimal. Investasi yang diperlukan untuk satu hektar lahan kelapa sawit hingga perolehan panen pertamanya berkisar antara 4000–8000 USD (USDA 2009; World Bank 2010: 28).

Faktor-faktor seperti kualitas dan umur pohon kelapa sawit, perawatan perkebunan, ketersediaan pupuk dan obat semprot sangat menentukan jumlah panen. Hasil panen minyak dari dua negara penanam kelapa sawit terbesar yaitu Malaysia dan Indonesia masing-masing pertahun 4,1 ton/hektar dan 3,5 ton/hektar. Para ahli bahkan menaksir sampai 8 ton minyak per hektar (Teoh 2010: 25; USDA 2009). Dengan demikian jumlah panennya jauh lebih besar dibandingkan dengan hasil panen tumbuhan lain yang juga menghasilkan minyak. Berdasarkan perkiraan, pohon kelapa sawit ditanam hanya pada areal seluas 5 persen dari keseluruhan areal untuk tumbuhan penghasil minyak nabati lainnya, tetapi mampu menghasilkan produksi sejumlah 38 persen dari total panen minyak nabati di seluruh dunia (Nestlé 2010).

Tabel 1: **Produksi minyak (hasil panen dalam kilogram per hektar)**

Kelapa sawit	3.500–8.000
Lobak (rapa)	1.000
Kacang tanah	980
Bunya matahari	800
Kelapa	395
Kacang kedelai	375
Kapas	173
Wijen	159

Sumber: CIFOR 2009: 11 / USDA 2009

**Lahan Tanam, Produksi dan Ekspor**

Data mengenai luas lahan kelapa sawit sangat bervariasi, tergantung sumbernya. Departemen Pertanian Amerika Serikat memperkirakan bahwa Indonesia pada tahun 2009 telah menanam kelapa sawit pada lahan seluas kira-kira 7,3 juta hektar. Organisasi-organisasi non-pemerintah bahkan memperhitungkan sampai 9,2 juta hektar (USDA 2009; SPKS 2010). Dinas pemerintah di Malaysia menaksir lahan perkebunan di Malaysia mencapai 4,7 juta hektar pada akhir tahun 2009 (Husain 2010).

Indonesia melonjak naik menjadi produsen ekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada musim panen 2009/10 negara kepulauan ini menghasilkan 21 juta ton minyak kelapa sawit, yaitu hampir separuh dari produksi minyak kelapa sawit dunia yang berjumlah 45 juta ton. Sebanyak 18 juta ton lainnya berasal dari Malaysia. Di samping minyak kelapa sawit yang dihasilkan dari perasan buah kelapa sawit, pada tahun panen 2009/10 juga terhitung 5,3 juta ton minyak biji sawit – yaitu minyak dari perasan biji sawit – yang masuk ke pasar dunia. Indonesia mendominasi pasar ini dengan 2,3 juta ton produksi, disusul Malaysia dengan angka 2,1 juta ton (USDA 2010a; Toepfer 2009: 35).

Lebih dari 90 persen ekspor dunia berasal dari Malaysia dan Indonesia. Patut diamati bahwa Indonesia mengalami pertumbuhan ekspor yang luar biasa antara tahun 2003 dan 2010 yaitu berlipat ganda menjadi 16,2 juta ton (musim panen 2009/2010) dan berdasarkan perkiraan akan terus meningkat (Tabel 2).

Tabel 2: Ekspor Minyak kelapa sawit  
(dalam 1000 ton)

	1982–84	1992–94	2003/04	2010/11 <sup>1</sup>
<b>Dunia</b>	4.536	10.113	21.610	37.440
Indonesia	435	1.815	7.856	18.000
Malaysia	2.981	6.291	11.602	16.100
Benin	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	480
Papua Nugini	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	426
Thailand	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	312
<b>1</b> Perkiraan				

Sumber: Toepfer 2009: 36 / USDA 2010 dan 2010a

### Multi Guna

Salah satu sebab meningkatnya pemakaian minyak kelapa sawit adalah karena kegunaannya yang sangat beragam. Mulai dari penggunaannya untuk kebutuhan rumah tangga seperti minyak goreng dan lemak, sampai penggunaannya dalam produk-produk industri seperti margarin, kue-kue kering, gula-gula, produk sereal, delikates dan mayones. Lebih lanjut, minyak kelapa sawit dipakai dalam industri-industri kimia untuk memproduksi cat, sabun, sabun cuci, produk-produk farmasi, minyak hidrolis dan minyak pelumas hingga penggunaannya sebagai bahan bakar. Pada pembangkit tenaga listrik yang digerakkan oleh bahan bakar minyak nabati, maka tergantung dari modelnya, ada minyak kelapa sawit yang dapat digunakan langsung tanpa perlu melakukan banyak perubahan teknis. Namun untuk

kendaraan yang menggunakan biodiesel, sebagai bahan bakarnya, maka minyak kelapa sawit -karena sifat kimianya- hanya dapat dipakai dalam jumlah kecil saja di dalam biodiesel.

71 persen dari minyak kelapa sawit dan minyak biji sawit dipergunakan dalam produksi bahan-bahan makanan, 24 persen untuk memproduksi barang kebutuhan sehari-hari seperti sabun, kosmetik, lilin dan sebagainya, dan sisanya 5 persen digunakan untuk menghasilkan energi (Agentur für Erneuerbare Energie 2010: 20).

Di negara-negara Uni Eropa besarnya tingkat penggunaan minyak kelapa sawit untuk keperluan industri berjumlah sekitar 45 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan jumlah rata-rata penggunaan minyak kelapa sawit untuk keperluan industri dari negara-negara di luar Uni Eropa. Demikian juga Cina dan negara-negara Asia Tenggara mencatat penggunaan minyak kelapa sawit dalam industri sebesar 35 persen. Sedangkan di India dan di Timur Tengah, minyak kelapa sawit terutama hanya digunakan sebagai bahan pangan (USDA 2010a: Tabelle 24–28).

Lebih dari separuh impor dunia masuk ke negara-negara seperti Cina, India, Uni Eropa dan Pakistan. Cina dan India masing-masing mengimpor minyak kelapa sawit sebesar 6,3 juta ton dan 7,6 juta ton (2010/2011), melebihi angka impor untuk 27 negara-negara Uni Eropa yang hanya berjumlah 5,4 juta ton. Sejak tahun 2003 angka impor ke negara-negara tersebut terus naik melampaui angka impor ke negara-negara Uni Eropa.

Tabel 3: Impor minyak kelapa sawit dalam 1.000 ton

	1982–84	1992–94	2003/04	2010/11 <sup>1</sup>
<b>Dunia</b>	4.336	9.489	21.733	36.770
India	628	237	3.486	7.600
Cina	32	1.296	3.710	6.250
Uni Eropa	840 <sup>2</sup>	1.668 <sup>3</sup>	3.371	5.400
Pakistan	381	1.051	1.297	2.300
Malaysia	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	1.250
Amerika Serikat	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	1.025
Bangladesh	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	900
Mesir	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	850
Iran	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	620
Jepang	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	580
Lain lain	tidak ada data	tidak ada data	tidak ada data	9.995
<b>1</b> Perkiraan; <b>2</b> dulu 10 negara anggota Uni Eropa; <b>3</b> 15 negara anggota Uni Eropa				

Sumber: Toepfer 2009: 38 / USDA 2010a: Table 11

### Masalah yang kompleks di Indonesia

Pada tahun 2008 tercatat sekitar 1,5 juta petani kecil di Indonesia yang menanam kelapa sawit dalam lahannya yang rata-rata hanya seluas 2 hektar. Sebagai bandingan, besarnya lahan yang dimiliki para pengusaha besar perkebunan dapat mencapai lebih dari 200.000 hektar (World Bank 2010: 14 – 23, USDA 2009). Sejumlah pemilik modal utama dari perusahaan-perusahaan kelapa sawit tersebut terhitung sebagai orang-orang terkaya di Indonesia. Perusahaan-perusahaan raksasa tersebutlah yang merupakan motor dari semakin meluasnya lahan perkebunan di Indonesia (FoE / Walhi 2009; EIA / Telepak 2009; Greenpeace 2010).

### Hukum lemah

Sebenarnya hutan Indonesia dilindungi. Tetapi pemerintah mengizinkan penebangan hutan untuk keperluan perkebunan. Hal ini dimanfaatkan dengan baik oleh perusahaan-perusahaan besar dengan menebangi hutan, namun tidak membuka perkebunan. Diperkirakan hampir 12 juta hektar telah ditebang tanpa ditanami (World Bank 2010:14). Selalu saja terjadi pelanggaran hukum di lokasi-lokasi perkebunan kelapa sawit. Dalam 25 tahun terakhir ini, propinsi Riau di Sumatra kehilangan areal hutannya sebesar 65 persen untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit atau perkebunan akasia. Penebangan hutan bahkan juga terjadi di tempat-tempat yang sebenarnya termasuk dalam kawasan hutan lindung (WBGU 2008: 81).

Di pulau Kalimantan, di bagian wilayahnya yang termasuk ke dalam negara Indonesia, juga sering ditandai dengan pelanggaran hukum, korupsi dan kekerasan (FoE / Walhi 2009), demikian juga di Papua (EIA/Telepak 2009). Jika terjadi pelanggaran hukum, maka perusahaan-perusahaan tersebut kerap mendapat dukungan dari aparat keamanan. Disinyalir adanya dugaan praktek korupsi dalam politik, dalam pemerintah daerah dan juga dalam aparat hukum (Marti 2008). Dalam indeks korupsi yang disusun oleh organisasi non-pemerintah *Transparency International*, Indonesia memperoleh angka 2,8 dari total nilai 10 dan dengan demikian menduduki peringkat 111 dari 180 negara-negara yang disurvei tingkat korupsinya di dunia (TI 2010 262 – 267, TI 2010: 49).

### Penebangan Hutan Hujan Tropis

Saat ini Indonesia merupakan negara ketiga terbesar di dunia yang mengeluarkan emisi gas-gas rumah kaca yang membahayakan iklim. 85 persen dari gas-gas tersebut dihasilkan akibat penggarapan lahan yang sebagian besar

dilakukan dengan penebangan hutan hujan tropis dan perusakan tanah gambut (Greenpeace 2010a: 1). Selain itu banyak habitat tumbuh-tumbuhan dan hewan langka yang ikut punah karena tidak dapat bertahan dalam lingkungan monokultur perkebunan kelapa sawit.

Berdasarkan perkiraan Bank Dunia, terdapat 70 persen perkebunan kelapa sawit yang dibangun di atas areal hutan (4,2 juta hektar), 25 persen bahkan dibangun di atas lahan gambut (World Bank 2010: 14). Hanya sepertiga dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan lahan tandus atau lahan yang sebelumnya ditanami dengan dengan tumbuhan lain (UNEP 2009: 65). Pada tahun-tahun terakhir, besarnya lahan gambut yang dipakai untuk perkebunan baru meningkat paling tidak menjadi 33 persen, di Riau, Sumatra bahkan mencapai 80 persen (Edwards / Mulligan / Marelli 2010: 141).

Walaupun demikian, pemerintah Indonesia masih menganggap mungkin untuk memperluas perkebunan sampai 24 juta hektar (Tabel 4).

### Jaminan pangan terancam

Menurut Bank Dunia, secara teori Indonesia mempunyai hampir 20 juta hektar tanah yang tidak digunakan atau tanah yang tidak produktif (World Bank 2010: 14 – 15). Walaupun demikian, banyak perusahaan-perusahaan sawit raksasa yang tetap memilih areal hutan untuk membuka perkebunan baru. Hal ini dikarenakan tanah hutan tidak memerlukan pupuk yang banyak jika dibandingkan dengan tanah tandus, sehingga mereka bisa memetik keuntungan yang lebih besar (UNEP 2009: 64). Selain itu, hasil penjualan dari penebangan kayu dapat dijadikan modal awal untuk membuka perkebunan.

Perambahan hutan untuk perkebunan-perkebunan baru di Indonesia telah menyebabkan timbulnya perlawanan keras dari penduduk. Hal ini dikarenakan hutan masih

Tabel 4: Besar lahan potensial untuk perluasan perkebunan berdasarkan wilayah

Kalimantan	10,3 juta ha
Sumatra	7,2 juta ha
Papua	6,3 juta ha
Sulawesi	0,37 juta ha
Java	0,29 juta ha

Sumber: USDA 2009

berfungsi sebagai pemberi kehidupan bagi penduduk sekitarnya. Bahkan pada tanah kosong yang sepiintas lalu berkesan tandus dan tidak produktif tetap merupakan sumber kehidupan penting untuk menjamin kelangsungan hidup manusia di sekitarnya (Colchester et al. 2006, FoE/I 2009, EIA/Telepak 2009).

#### **Pengabaian Hak Asasi Manusia**

Situasi di Papua menunjukkan bahwa hak asasi manusia merupakan masalah mendasar bagi kita semua. Bagian barat dari pulau Nugini ini termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Luas Papua meliputi sekitar 422.248 km<sup>2</sup>, lebih luas dari negara Jerman dan sebagian besar masih tertutupi dengan hutan. Pemerintah Indonesia memperkirakan 5 sampai 9,3 juta hektar lahan di Papua bisa ditanami dengan kelapa sawit (Klute 2008: 7). Banyaknya kesimpangsiuran dalam pemerintahan propinsi dan dalam reformasi pemerintah daerah, korupsi serta kebijakan politik tertentu dari pemerintah pusat di Jakarta menyebabkan terhambatnya pembentukan konsep penggunaan hutan yang berkelanjutan. Sementara ini sangat tidak memungkinkan untuk mendapatkan data yang akurat tentang lokasi penebangan hutan atau lokasi perkebunan yang mendapat izin resmi atau tanpa izin resmi dari pemerintah. Oleh karena itu, hak-hak penduduk asli di banyak wilayah diabaikan begitu saja.

Masyarakat Indonesia sendiri tidak mendapat keuntungan yang banyak dari sektor produksi baru ini. Harga-harga sewa tanah jauh di bawah harga pasaran yang sebenarnya. Untuk mendapatkan izin penggunaan tanah, masyarakat dijanjikan dengan pendirian sekolah-sekolah, pengadaan listrik dan rumah baru – sebuah janji yang jarang sekali ditepati. Banyak orang yang tidak mengerti dengan apa yang telah ditandatangani, bahkan tidak tahu, sejauh mana dan resiko apa saja yang bisa terjadi dengan pemberian tanda tangan mereka tersebut. Perusahaan-perusahaan yang bekerja dengan cara seperti ini menjalin hubungan yang sangat erat dengan para politikus, sehingga penduduk biasa tidak akan berdaya sama sekali melawan mereka (EIA/Telepak 2009: 1).

Konflik berikutnya yang muncul adalah tingginya arus pendatang. Penanaman kelapa sawit adalah suatu proses kerja yang sangat intensif. Untuk lahan seluas seribu hektar dibutuhkan sekitar 350 pekerja (World Bank 2010: 28). Saat ini propinsi Papua memiliki sekitar 2,9 juta penduduk. Seandainya perkebunan kelapa sawit benar-benar akan dikembangkan seluas 5 juta hektar, maka



Foto: Greenpeace / Natalie Behring

untuk itu akan dibutuhkan sekitar 1,75 juta tenaga kerja yang sebagian besar harus didatangkan dari daerah-daerah lain di Indonesia. Akibatnya akan menambah ketegangan yang memang sudah ada diantara penduduk asli dan para pendatang (EIA/Telepak 2009: 7-8).

Berdasarkan perkiraan, terdapat hampir 3 juta orang di Indonesia yang bekerja di perkebunan kelapa sawit (Teoh 2010: 9). Di samping pekerja tetap, terdapat pekerja musiman atau pekerja harian yang direkrut untuk perkebunan-perkebunan tersebut. Banyak diantara mereka yang bekerja dalam kondisi kerja yang sangat buruk, terutama para pekerja perempuan. Seringkali upah yang dibayarkan di bawah rata-rata upah minimum yang telah ditetapkan. Selain itu, pemakaian pupuk dan pestisida sangat beresiko terhadap kesehatan para pekerja yang biasanya bekerja tanpa memakai baju pelindung dan tanpa pengarahan yang memadai (Mardi 2008: 76-84).

#### **Mendukung metode yang berkelanjutan**

Banyaknya kritik terhadap dampak pengembangan kebun kelapa sawit telah menyebabkan dibentuknya *Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO* pada tahun 2003, yaitu suatu forum untuk membahas produksi minyak kelapa sawit secara berkelanjutan. Yang terlibat di dalamnya adalah sejumlah perusahaan dan perkumpulan sektor kelapa sawit, para pengusaha industri minyak kelapa sawit serta organisasi-organisasi non-pemerintah.

Tujuannya adalah untuk mewujudkan metode penanaman kelapa sawit yang berkelanjutan. Pada tahun 2009 terhitung 1,4 juta ton minyak kelapa sawit bersertifikat RSPO yang masuk ke pasar dunia. Angka tersebut mencakup 3,2 persen dari keseluruhan panen dunia. Jumlah ini diharapkan akan berlipat ganda pada tahun 2010.

Namun demikian banyak kritik tajam yang berulang kali dilontarkan pada RSPO. Greenpeace mengkritik kriteria-kriteria yang disusun RSPO tidak cukup ketat. Selain itu organisasi-organisasi lingkungan hidup berhasil membuktikan adanya kelompok perusahaan yang walaupun pada sebagian produksinya telah memiliki sertifikat RSPO, namun perusahaan-perusahaan cabang lainnya tetap menebangi hutan-hutan tropis untuk memperluas lahan perkebunannya.

Oleh karena itu, sekumpulan perusahaan yang bergerak di sektor pangan seperti Nestlé, Rewe dan Edeka berusaha menyusun sebuah standar yang jauh melampaui ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan RSPO (Burger 2010).

#### **Dampak Biodiesel terhadap Iklim**

Penggunaan minyak kelapa sawit dapat dikembangkan lebih lanjut yaitu untuk menghasilkan energi. Dalam hal ini yang menjadi perdebatan adalah dampak penggunaannya terhadap iklim dunia. Pada saat pembakaran biodiesel dari minyak kelapa sawit, jumlah karbon dioksida yang dilepaskan memang tidak lebih besar dari jumlah karbon dioksida yang diikat sebelumnya oleh tumbuh-tumbuhan tersebut. Namun harus diingat bahwa pada saat tanam, panen, peras, transportasi atau pada pengolahan lanjutan, banyak terbuang gas-gas rumah kaca yang dapat mempengaruhi iklim. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa pada pembakaran minyak kelapa sawit untuk energi, dihasilkan emisi gas rumah kaca yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan jumlah emisi yang dikeluarkan dari bahan bakar fosil (IFPRI 2010;64–66). Analisa lainnya menyebutkan bahwa neraca iklim yang positif hanya dapat dicapai, jika penanaman kelapa sawit dilakukan pada lahan yang sebelumnya tidak digunakan dan tidak pada lahan hutan.

Yang lebih diperdebatkan lagi adalah jika melihat dampak tidak langsung yang disebabkan oleh penggunaan minyak kelapa sawit untuk menghasilkan energi. Untuk setiap satu liter minyak nabati yang digunakan dalam campuran biodiesel sebagai bahan bakunya, maka harus

dibayar dengan lahan perkebunan yang cukup luas. Hal ini menyebabkan terdesaknya ekosistem yang kaya akan karbon seperti hutan dan tanah gambut yang sebenarnya bisa digunakan untuk menanam bahan pangan yang lain atau untuk menghasilkan produk-produk pertanian lainnya. Sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa penggunaan minyak kelapa sawit untuk menghasilkan energi mempunyai dampak yang negatif terhadap iklim (Öko-Institut 2010: 17; Bowyer 2010).

#### **Permintaan meningkat**

Di Eropa, tingkat konsumsi minyak dan lemak nabati terhitung sebesar 59,3 kg per orang per tahun, sementara jumlah konsumsi rata-rata di seluruh dunia hanya 23,8 kg per orang. Negara-negara berkembang seperti India, Pakistan atau Nigeria mengkonsumsi jumlah yang jauh lebih sedikit: India (13,4 kg), Pakistan (19,9 kg) dan Nigeria (12,5 kg). Namun akibat pertambahan penduduk yang sangat pesat di negara-negara tersebut telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan akan minyak kelapa sawit. Selain itu, seiring dengan membaiknya ekonomi seseorang, maka banyak konsumen yang beralih dari penggunaan minyak nabati bermutu rendah ke minyak kelapa sawit yang mutunya lebih baik.

Diperkirakan sampai tahun 2020, kebutuhan dunia terhadap minyak nabati akan bertambah hingga sebesar 27,7 juta ton. Untuk menutupi kebutuhan tersebut diperlukan lahan untuk memproduksi minyak kelapa sawit sebesar 6,3 juta hektar atau lahan untuk minyak kedelai seluas 42 juta hektar (Teoh 2010: 9–10).

#### **Biodiesel memicu permintaan**

15 persen dari produksi minyak nabati dunia digunakan sebagai bahan bakar. Sejak tahun 2003, penggunaannya terus meningkat dari sekitar 2 juta ton menjadi 18 juta ton pada tahun panen 2009/2010. Dari jumlah tersebut 1,8 juta ton adalah minyak kelapa sawit. Memang jumlah ini masih terhitung relatif sedikit jika dibandingkan dengan hasil panen dunia dari minyak kelapa sawit dan minyak biji sawit yang berjumlah sekitar 50 juta ton. Walaupun demikian, lima tahun sebelumnya belum ada minyak kelapa sawit yang diolah untuk bahan bakar (Nestlé 2010).

Kalau seandainya semua rencana yang bertujuan untuk menggunakan minyak nabati sebagai bahan campuran dalam biodiesel terlaksana, maka tingkat kebutuhannya akan melonjak drastis. Dan jika hanya mengambil minyak kelapa sawit saja sebagai bahan campuran

biodiesel, maka akan diperlukan perkebunan kelapa sawit seluas 4 juta hektar, itupun hanya cukup untuk menutupi kebutuhan di Uni Eropa (Teoh 2010: 10; IFPRI 2010: 114).

Terlepas daripada itu, permintaan minyak kelapa sawit tetap akan terus bertambah. Hal ini disebabkan oleh semakin banyaknya minyak nabati lain yang diolah sebagai bahan bakar dan tidak lagi digunakan sebagai bahan makanan (IFPRI 2010: 26).

Karena harga minyak kelapa sawit relatif rendah, maka kebutuhan minyak nabati yang terus meningkat akan ditutup dengan minyak kelapa sawit. Penawaran terbesar untuk memasok minyak kelapa sawit datang dari Indonesia. Berdasarkan kecendrungan selama ini, maka di Indonesia akan dibangun sampai 9 juta hektar perkebunan dalam sepuluh tahun mendatang. Sebagian besar perkebunan itu dibangun dengan menebangi hutan-hutan tropis (Greenpeace 2010a: 43).

#### Tuntutan-tuntutan

Pada bulan Agustus 2010, sekumpulan organisasi non-pemerintah Indonesia menyusun tuntutan-tuntutan untuk diajukan pada pemerintah dan juga ditujukan pada perusahaan-perusahaan bisnis kelapa sawit. Tuntutan-tuntutan tersebut antara lain adalah:

1. Ganti rugi atas kerusakan-kerusakan yang telah ditimbulkan: masalah terbesar adalah perampasan tanah penduduk asli dan konflik-konflik lahan. Pemerintah seharusnya menanggapi dengan serius persoalan-persoalan yang terjadi tersebut dan harus bekerja keras agar hal itu tidak terulang lagi di masa yang akan datang.
2. Memperketat aturan-aturan dan penegakan hukum: setiap investasi di sektor kelapa sawit harus sesuai dengan standar internasional, antara lain patuh pada undang-undang nasional dan perjanjian internasional. Selain itu harus melampirkan surat rekomendasi yang mencakup dampak sosial dan lingkungan dari investasi tersebut serta uraian hasil pelaksanaannya. Peminjaman paksa penduduk harus dihindari dan pelepasan tanah harus berdasarkan proses hukum dan adanya persetujuan sukarela. Menghindari terjadinya konflik wilayah dan mencari solusi atas konflik-konflik yang sudah ada dengan menghormati hak-hak penduduk asli. Bagi masyarakat yang bersangkutan, sebelumnya harus diberikan informasi yang menyeluruh sehingga

mereka bisa dengan bebas dan sukarela menyatakan penolakan atau persetujuan atas program pembangunan yang direncanakan dalam wilayah mereka (*Free, Prior, Informed Consent, FPIC*). Memperhatikan habitat-habitat, ekosistem dan spesies-spesies yang terancam dan mempertahankan hutan-hutan yang bernilai konservasi tinggi.

3. Bertanggung jawab terhadap iklim: pemerintah harus melarang pengembangan perkebunan kelapa sawit di atas lahan hutan atau penanaman di atas tanah gambut karena akan mengakibatkan pelepasan gas-gas rumah kaca yang merusak iklim. Untuk menjamin hal ini, maka diperlukan politik nasional yang mengatur penggunaan tanah dengan memperhatikan dampak lingkungan.

#### Berdasarkan butir-butir tuntutan di atas, maka Uni Eropa mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- Pada pengimporan minyak kelapa sawit, baik untuk kebutuhan pangan atau untuk keperluan industri, maka Uni Eropa harus bertekad untuk berpegang pada kriteria-kriteria produksi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan.
- Penggunaan minyak kelapa sawit untuk produksi bahan bakar akan membahayakan kelangsungan jaminan bahan pangan lainnya, terutama bagi orang miskin. Oleh karena itu, penggunaannya sebagai bahan bakar hanya dibolehkan jika tidak mempunyai dampak sosial yang negatif.
- Uni Eropa harus menuntut badan-badan internasional agar secara global memajukan usaha-usaha untuk memperbaiki standar ekologi dan sosial dalam produksi minyak kelapa sawit, serta mendukung adanya penyusunan standar yang berkelanjutan yang berlaku diseluruh dunia.
- Uni Eropa harus menuntut institusi-institusi multilateral seperti Bank Dunia atau organisasi-organisasi PBB agar pengelolaan dana iklim ditujukan untuk menjadikan pelestarian hutan hujan tropis sebagai sebuah investasi yang menguntungkan.

**Bahan Bacaan**

- Agentur für Erneuerbare Energie e.V. 2010: in Sachen Energiepflanzen
- Bowyer, Catherine 2010: Anticipated Indirect Land Use Change Associated with Expanded Use of Biofuels and Bioliquids in the EU
- Burger, Kathrin 2010: Pflanzlich, aber schädlich, in: Die Zeit, 07. Oktober 2010
- CIFOR (Hrsg.) 2009: The impacts and opportunities of oil palm in Southeast Asia
- Colchester, Marcus et al. 2006: Promised Land
- Edwards, Robert/Mulligan, D./Marelli, L. 2010: Indirect Land Use Change from increased biofuels demand
- EIA/ Telepak (2009): Up for grabs
- FoE (Friends of the Earth Netherlands) / Walhi 2009: Failing governance – Avoiding responsibilities
- IFPRI 2010: Global Trade and Environmental Impact Study of the EU Biofuels Mandate. Final Report March 2010
- Greenpeace International 2010: How Sinar Mas is pulping the planet
- Greenpeace International 2010a: Protection Money
- Husain, Norihan (Malaysian Palm Oil Board) 2010: Mail an den Verfasser vom 15.9.2010
- Klute, Marianne 2008: Forests in Papua: Data and Facts
- Nestlé 2010: oil usage for biofuel production
- Marti, Serge 2008: Losing Ground. The human rights impacts of oil palm plantation expansion in Indonesia A report by Friends of the Earth, LifeMosaic and Sawit Watch
- Öko-Institut (Hrsg.) 2010: The “iLUC Factor” as a Means to Hedge Risks of GHG Emissions from Indirect Land Use Change
- SPKS (Serikat Petani Kelapa Sawit Sanggau) 2010: Fulfill Companies’ Commitment to Respect Human Rights and Best Practices for Indigenous Peoples, Farmers and Labourers
- Teoh, Cheng Hai 2010: Key Sustainability Issues in the Palm Oil Sector
- Toepfer International 2009: STATISTICAL INFORMATION About the Grain and Feedstuff Market
- TI (Transparency International) 2009: Global corruption Report 2009
- TI 2010: Annual report 2009
- UNEP 2009: Towards sustainable production and use of resources: Assessing Biofuels
- USDA (United States Department of Agriculture) 2009: Indonesia: Palm Oil Productions Growth to continue
- USDA 2010: Oilseeds: World Markets and Trade, Circular Series FOP 6 – 10, June 2010
- USDA 2010a: Oilseeds: World Markets and Trade, Circular Series FOP 11 – 10, November 2010
- WBGU 2008: Zukunftsfähige Bioenergie und nachhaltige Landnutzung
- World Bank 2010: Rising Global Interest in Farmland

Penerbit: Brot für die Welt, Staffenbergstraße 76, 70184 Stuttgart, Tel.: (07 11) 21 59 - 568  
E-Mail: kontakt@brot-fuer-die-welt.de, www.brot-fuer-die-welt.de.

Vereinte Evangelische Mission, Rudolfstr. 137, 42285 Wuppertal, Tel.: (02 02) 89 00 41 42  
E-Mail: jpic@vemission.org

Penulis: Friedel Hütz-Adams, SÜDWIND e.V.

Editorial: Carolin Callenius, Dr. Jochen Motte, Vera Schumacher, Penanggung-jawab.: Thomas Sandner

Layout: Jörg Jenrich

Art. Nr.: 129 500 570 01/2011

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan menghubungi: Longgena Ginting, E-mail: uem.climate.asia@gmail.com

01/2011

Im Verbund der  
**Diakonie**  
Mitglied der  
**actalliance**